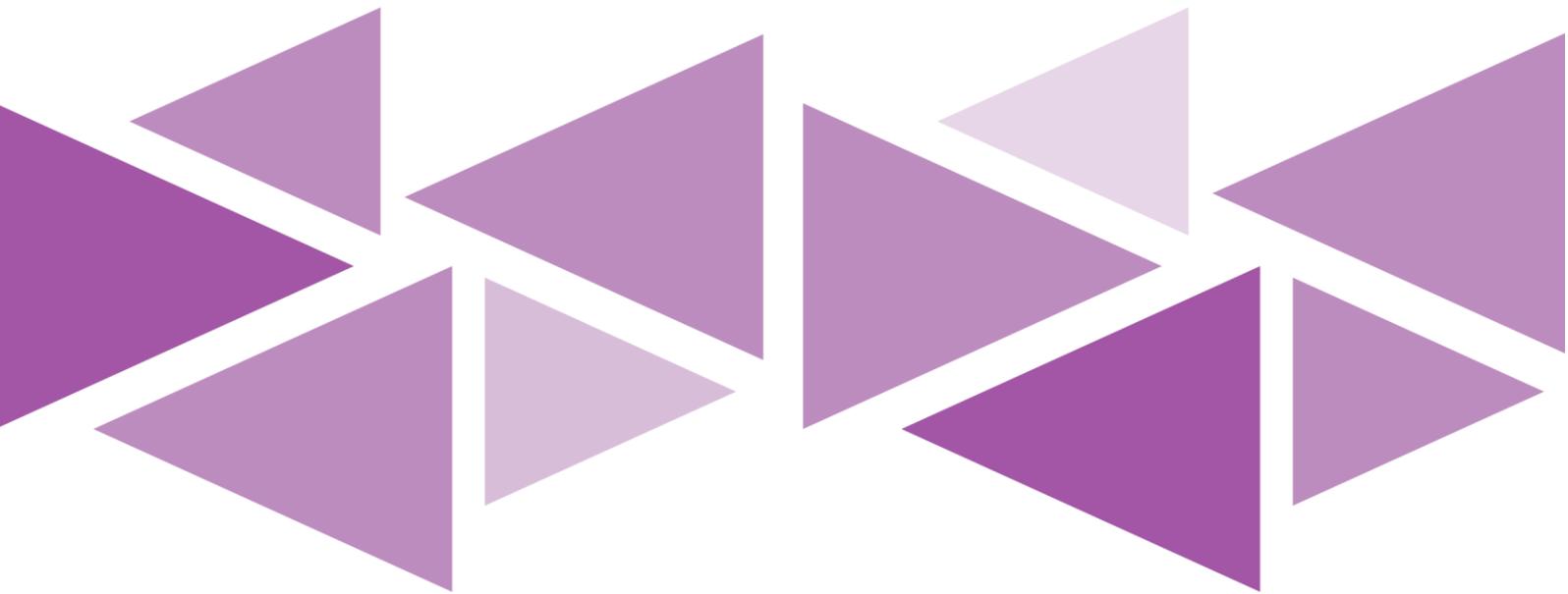




LAPORAN TAHUNAN

TA. 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari tugas tersebut dan sejalan dengan Visi Kota Banjarbaru yaitu : **TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER**", dan Misi dari Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru tersebut perlu diikuti dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 SeriD Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) ; dan
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru; dan
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru;
13. Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100/0587/Pem-setda tanggal 21 Desember 2020 tentang Laporan Tahunan SKPD TA.2020.

B.GAMBARAN UMUM SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

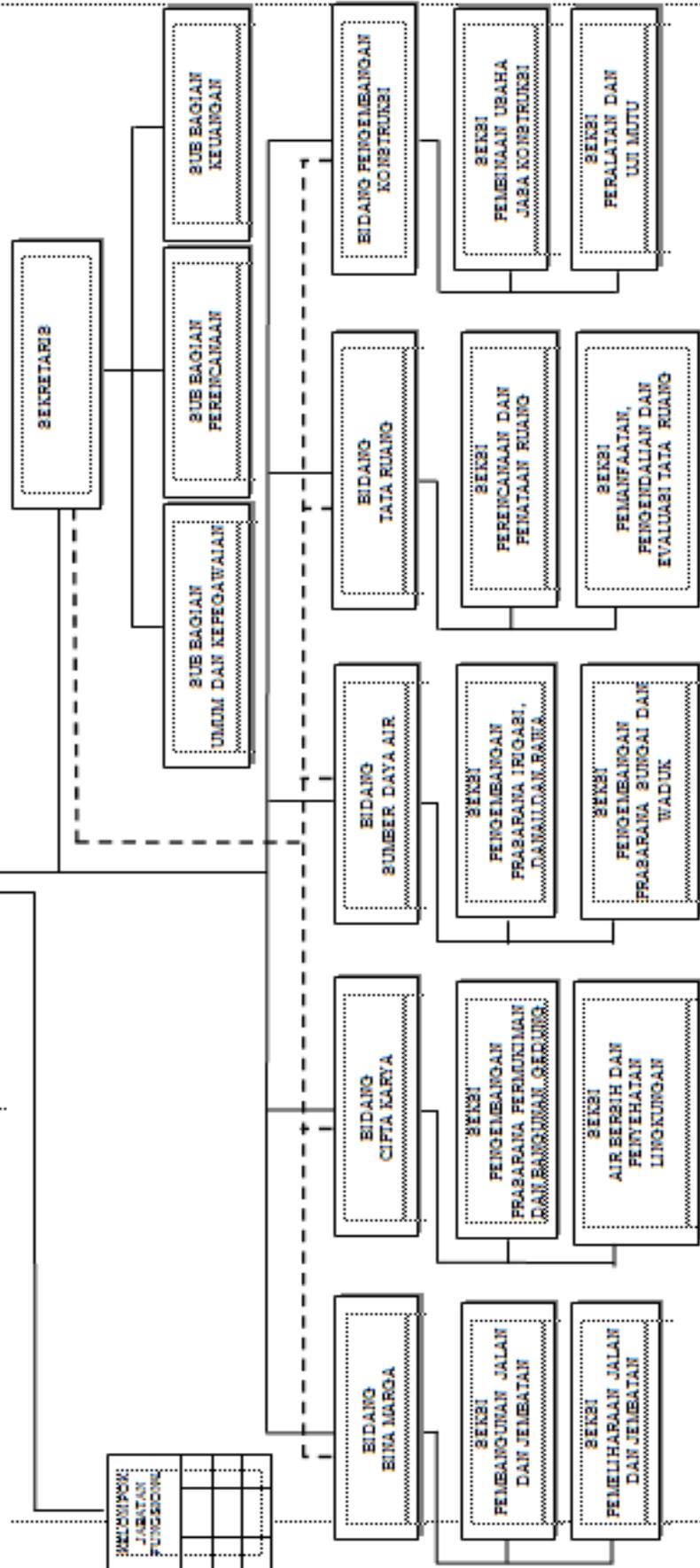
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri daerah:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
 2. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Peralatan dan Uji Mutu.

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 49 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA
 BANJARBARU



KETERANGAN :
 : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi

2.1. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru sebanyak 78 orang, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. Berdasarkan golongan ruang, PNS DPUPR sebanyak 45 orang yang terdiri dari 10 orang Golongan IV, 29 orang Golongan III, 4 orang Golongan II dan 1 orang Golongan I (Tabel 1). Sedangkan jumlah Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 40 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. ASN dengan latar belakang Pendidikan S-2 sebanyak 14 orang dan S-1 sebanyak 43 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 7 orang, SLTA dan SD sebanyak 13 orang (Tabel 2).

Tabel. 1
DATA PNS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TAHUN 2021

No.	Golongan Ruang	Jumlah Orang	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Golongan IV	10 orang	7 orang	3 orang
2	Golongan III	30 orang	19 orang	11 orang
3	Golongan II	4 orang	2 orang	2 orang
4	Golongan I	1 orang	1 orang	-
Jumlah		45 orang	29 orang	16 orang

Tabel.2
DATA PEGAWAI ASN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sarjana Strata 2 (S-2)	14 orang	5 orang	9 orang
2	Sarjana Strata 1 (S-1)	43 orang	22 orang	21 orang
3	Diploma IV	1 orang	1 orang	-
4	Diploma III	7 orang	4 orang	3 orang
5	SLTA	12 orang	7 orang	5 orang
6	SD	1 orang	1 orang	-
Jumlah		78 orang	40 orang	38 orang

Keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat Nama dan Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru keseluruhan berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Usia.

Tabel 3.
NAMA PEGAWAI (PNS, PTT, DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2021

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. Jaya Kreshna 19631105 199302 1 002	Kepala Dinas	S1	Pembina Utama Muda	IV/c	58
2	Eka Yuliesda A, ST,MT 19730727 199803 2 008	Sekretaris	S2	Pembina Tk.I	IV/a	48
3	Abdussamad, ST, MT 19730927 199811 1 001	Kabid Cipta Karya	S2	Pembina	IV/a	48
4	M. Adi Maulana, ST, MT 19831125 200604 1 005	Kabid Bina Marga	S2	Pembina	III/d	38
5	Subrianto, ST, MT 19710731 199303 1003	Kabid Sumber Daya Air	S2	Pembina	IV/a	50
6	Akhmad Syahidan, S.Pi, M.Ec.Dev 19721031 199703 1 003	Kabid Tata Ruang	S2	Pembina	IV/a	49
7	Sumaryono, ST, MT 19680726 199603 1 004	Kabid Pengembangan Konstruksi	S2	Pembina	IV/a	53
8	Rahmat Juliani, ST 19750701 200604 1 018	Kasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	S1	Penata Tk.I	III/d	46
9	A. Rizani, ST 19720527 200604 1 013	Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	S1	Penata Tk.I	III/d	49
10	Rusna Apriani, ST 19770419 200701 2 009	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	44
11	Wahyuni, ST 19770418 199803 1 006	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	45
12	Benny Surya Atmaja, ST, MT 19770811 201101 1 002	Kasi Pengembangan Pras. Irigasi, Danau & Rawa	S2	Penata	III/c	45
13	Pieta Widhiasari, ST, MT 19811022 200604 2 012	Kasi Pengembangan Pras. Sungai dan Waduk	S2	Pembina	IV/a	40

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
14	Poppy Syofia Yunidar Marthiana, ST, MT 19820603 200604 2 030	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang	S2	Penata Tk. I	III/d	39
15	M. Aulia Rizhan, ST 19771025 200701 1 009	Kasi Pemanf., Pengend. Dan Evaluasi Tata Ruang	S1	Penata Tk. I	III/d	44
16	Ir. Yuliansyah, MT 19650719 199703 1 006	Kasi Peralatan & Uji Mutu	S2	Pembina	IV/a	56
17	Fathurrahmani, ST 19710929 200604 1 006	Kasi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	S1	Penata Tk.I	III/d	50
18	Erny Sukmawati, ST, MM 19760123 200003 2 004	Kasubbag Keuangan	S2	Pembina	IV/a	45
19	Alip, S.Sos 19670622 199803 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	Penata Tk. I	III/d	54
20	Henny Rachmaniar, ST 19770917 200701 2 014	Kasubbag Perencanaan	S1	Penata Tk. I	III/d	44
21	Zabidi Anshari, ST, MT 19690228 199703 1 010	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya	S2	Pembina Utama Muda	IV/c	52
22	Iwan Noviantara, ST 19781123 201001 1 001	Fungsional Penata Ruang Muda	S1	Penata	III/c	43
23	Yuni Rosyada, A.md 19800621 201001 2 013	Fungsional Pranata Komputer	D-III	Penata Muda	III/a	41
24	Irpansyah, SST 19760708 199803 1 004	Pemelihara Jalan	D IV	Penata Tk.I	III/d	45
25	Irwansyah Isnaini M., ST 19801110 200904 1 002	Pengawas Bangunan dan Gedung	S1	Penata	III/c	41
26	Laila Hanif, A.Md 19830416 201406 2 003	Pengawas Jaringan Utilitas	D-III	Pengatur Tk. I	II/d	38
27	Heri Yuwandi, ST 19790831 201001 1 003	Pengawas Jalan dan Jembatan	S1	Penata	III/c	42
28	Nurliana Eka Purnamasari, ST 19810323 200604 2 040	Penelaah Mutu Konstruksi	S1	Penata Tk. I	III/d	40

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
29	Idris Machmudin 19641028 198703 1 017	Operator Alat Berat	SLTA	Penata Muda Tk. I	III/b	57
30	Supian Ilmi 19631201 200901 1 001	Operator Alat Berat	SD	Juru	I/c	58
31	Dedi Hidayat, A.Md 19851222 201101 1 009	Operator Alat Berat	D-III	Penata Muda	III/a	36
32	Mirza Cahyadi, ST 19791223 200701 1 006	Analisis Tata Ruang	S1	Penata Tk.I	III/d	42
33	Heny Henderawati, ST 19770110 200701 2 020	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	S1	Penata Muda Tk.I	III/b	44
34	Sukirman 19660727 201212 1 001	Operator Alat Berat	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	55
35	Indra Sumargo, SE 19730506 200901 1 003	Bendahara	S1	Penata	III/c	48
36	Kristina Endang,S,SE 19780622 201001 2 006	Penata Laporan Keuangan	S1	Penata	III/c	43
37	H.M. Nursolichi 19691225 199103 1 008	Pengelola Gaji	SLTA	Penata Muda Tk.I	III/b	52
38	Nindika Kusyaning.Rd, SE 19880228 201001 2 013	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	S1	Penata Muda	III/a	33
39	Dhermawan 19720417 200701 1 017	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	49
40	Fitriyani 19770914 201212 2 002	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	44
41	Novia Tinna Wijayanti, ST 19861109 202012 2 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	36
42	Ramayanti, S. Ars 19901108 202012 2 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	32
43	Diana Pratiwi, S. Ars 19930309 202012 2 005	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	29
44	Andhika Yusuf Prabowo, S. Ars 19961122 202012 1 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	26
45	M. Irhash Maulana, S. Ars 19970318 202012 1 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Lingkungan	S1	Penata Muda	III/a	25
46	M. Rizal, S.ST 757 057 704	Tenaga Teknis Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	44
47	Eddy Rusmadi, ST 839 058 104	Tenaga Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	38

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
48	Evie Noviannor, ST 849 057 704	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Irigasi,Danau & Rawa	S1	-	-	44
49	Fitria Nur Sarie, ST 824 058 104	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	39
50	Hendra Mianata, A.Md 848 058 104	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Irigasi,Danau & Rawa	D-III	-	-	39
51	M. Taufik Amrullah, ST 101 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	40
52	Fanny Yudhadinata,ST 157 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	40
53	Noorlianty,ST 256 77 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	44
54	Linda Nuvita Rini,ST 136 84 10	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	37
55	Selamet Heru Widodo,ST 045 80 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Usaha Jasa Konst.	S1	-	-	41
56	Risa Wisdayanti,SE 113 84 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	S1	-	-	37
57	Linda Ariani 050 85 08	Operator Komputer Subbag Umpeg	SLTA	-	-	36
58	Yenny Marlini,ST 053 84 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	37
59	Niken Amalia Pusparini,ST 083 85 09	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	36
60	Akhmad Riza Ramadhan, A.md 007 88 10	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	D-III	-	-	33
61	Tri Bahagia Ningrum 052 89 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	SLTA	-	-	32
62	Ramadhani Taufiqurrahman 274 84 09	Operator Alat Berat Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	SLTA	-	-	37
63	Ustien Anaina Maria, SE, MT 420 76 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	S2	-	-	45
64	Annajah 078 87 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	34

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
65	Tasya Rizkita Amalinda, S.Ars 05.92.18.02	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	29
66	Gt.M.Fakhruriza R., A.Md 15.94.18.03	Tenaga Administrasi Subbag Keuangan	D-III	-	-	27
67	Rizkika Zulhijjani, S.PWK 05.98.21.11	Pengelola Geos Pansial Seksi Perencanaan Dan Penataan Ruang	S1	-	-	23
68	M. Aprianor 05.98.21.11	Tenaga Administrasi Subbag Umpeg	SLTA	-	-	23
69	Ana Noviana, ST 15.87.19.04	Tenaga Administrasi Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	34
70	M. Farkhan Abidillah, S.PWK 005.92.19	Pengelola Teknis Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Evaluasi tata Ruang Bid.Cipta Karya	S1	-	-	29
71	Ahlia, Amd 05.74.20.09	Administrasi Umum Subbag Umpeg	D-III	-	-	47
72	An Nisa Kesuma Pertiwi, ST. MT 05.90.21.15	Tenaga Teknis Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk. Bidang Cipta Karya	S2	-	-	32
73	Fauzi Alvi, S. Ars 05.93.19.05	Tenaga Teknis Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	28
74	Rissa Saftiranti, SKM 05.88.19.06	Pengadministrasian Umum Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	33
75	M. Naufal Firdaus 05.01.19.07	Tenaga Teknis Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	20
76	M. Rizkian Noor, ST 05.92.21.10	Tenaga Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	S1	-	-	29
77	Husna Nadhira Awfiyaa, ST 05. 92. 21.14	Tenaga Administrasi Seksi Pengembangan Prasarana irigasi, Danau dan Rawa	S1	-	-	29
78	Diyaul Lubaba 05.00.21.13	Pembantu Administrasi Aset Subbag Umpeg	SLTA	-	-	21

BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengacu pada Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu :

Misi I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.

Misi II : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
- 2) Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas.
- 3) Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup.

2. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah Jangka Menengah (5 tahun) kedepan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 3) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 4) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- 5) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

- 6) Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung.
- 7) Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.
- 8) Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 9) Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 10) Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sumber Daya Air

- Meningkatkan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS).
- Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun.
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air.

b. Bidang Bina Marga.

- Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.
- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalampelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
- Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.

c. Bidang Cipta Karya.

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang aman.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

- Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.
- d. *Bidang Tata Ruang*
- Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
 - Menyediakan dokumen rencana tata ruang (RTRW dan rencana rinci TR).
 - Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang penataan ruang.
- e. *Bidang Pembinaan Konstruksi*
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
 - Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
 - Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
 - Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapainya, yaitu dengan :

1. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
6. Meningkatkan Kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
7. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
8. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
9. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi

11. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan bewawasan lingkungan.
13. Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan.
14. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
15. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
16. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021, terdiri dari :

- a. 12 (dua belas) Program;
- b. 22 (dua puluh dua) Kegiatan; dan
- c. 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan

Dari 12 (dua belas) Program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan tersebut apabila dijelaskan lebih rinci menjadi sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2.) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.) Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- 1.) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
 - b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- 2.) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

III. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 1.) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

IV. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 1.) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

V. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1.) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

VI. Program Pengembangan Pemukiman

- 1.) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1.) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

VIII. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

- 1.) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

IX. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1.) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

X. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 1.) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 2.) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - a. Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
- 3.) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

XI. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1.) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 2.) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 3.) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- XII. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**
- 1.) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel. 4
Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	SEKRETARIAT
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	
	Meningkatnya nilai AKIP SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	48 Orang	
	Meningkatnya penatausahaan Aset DPUPR sesuai dengan perundang-undangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 Laporan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Baik	
	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	3 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	3 Paket	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	65 Buku	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	49.500 Lembar	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	96 Eks	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	95 Laporan		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	10 Buah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	13 Unit	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	5 Buah	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	5 Jenis	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	4 Orang	
	Jasa pelayanan umum kantor lainnya				
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab	
				Tahun 1 (2021)		
				Target		
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	16 Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Buah		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket		
Meningkat Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24.34%	SUMBER DAYA AIR	
			Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64.09%		
	Berkurangnya permasalahan rawan banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	24.34%		
	Panjang Tebing dan tanggul Sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan normalisasi, serta Infrastruktur pengendali banjir	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang ditingkatkan (m)	372 m		
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)	6.608 m		
		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)	-		
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara (buah)	-		
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	64.09%		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
		Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Infrastruktur Irigasi dalam Keadaan Baik	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2.625 m'	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi	233 Ha	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara	233 Ha	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	96.55%	CIPTA KARYA
	Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas dan merata	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	96.55%	
	Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan akses air minum yang aman	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang dibangun	4.224 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100%	CIPTA KARYA
	Terwujudnya infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100%	
	Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pembangunan/Pebedaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun	270 KK	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	57.87%	BINA MARGA
	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	52.28%	BINA MARGA

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
	Meningkatnya sistem jaringan Drainase lingkungan dalam kondisi baik	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	63.46%	CIPTA KARYA
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	2.000 m	BINA MARGA
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	897 m	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	4.441 m	
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	5.239 m	CIPTA KARYA
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan	6.060 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengembangan Permukiman.	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85.56%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	85.56%	
	Meningkatnya panjang Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	21.779 m	
			Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	5.074 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	1 unit	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	6 unit	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemandapan jalan kota	81.21%	BINA MARGA
	Meningkatnya tingkat kemandapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	81.71%	
	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru		Persentase jalan kota yang terbangun	2.36%	
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun	1.740 m	
	Terlaksananya rekonstruksi jalan kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	3.500 m	
			Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	760 m	
			Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun	0 buah	
Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	6.200 m		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	1.278 m	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	2.744 m	
	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	10 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	PENGEMBANGAN KONSTRUKSI
	Meningkatnya ketersediaan informasi Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	
	Terpenuhinya rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100%	
	Terwujudnya pelayanan rekomendasi teknis sesuai dengan SOP	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	60 Rekomendasi	
	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	
	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 paket	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66.33%	TATA RUANG
	Mewujudkan tertib perencanaan tata ruang kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	15.83%	
	Tersusunnya dokumen teknis Rencana Tata Ruang (RTR)	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	2 Dok	
	Mewujudkan tertib pemanfaatan ruang kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	
	Terselesaikannya perizinan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100%	
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2021)	
				Target	
	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan peruntukan ruangnya	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukan ruangnya	50 lokasi	
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0.042%	TATA RUANG
	Menigkatnya luasan RTH di lingkungan perumahan/Fasilitas umum yang terbangun	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	76824 m²	
	Bertambahnya lokasi RTH lingkungan perumahan/Fasilitas umum yang terbangun	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	6 lokasi yang dibangun	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota (ha)		45,13 Ha	
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota (m)		74.429 m	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer (m)}} \times 100 \%$	$\frac{17.963}{25.3} \times 100\%$	71%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m)}} \times 100 \%$	$\frac{68.376,94}{134.381} \times 100\%$	51%
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier (m)}} \times 100 \%$	$\frac{43.185}{60.824} \times 100\%$	71%
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	Pemenuhan dokumen RISPAM Kota		Tidak Ada	
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota		Tidak Ada	
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota penyelenggaraan SPAM		1 Perusahaan	
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak Ada	
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Tidak Ada	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		52.081 rumah	

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		7.280 rumah	
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD- T		59.361 rumah	
4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		7.280 rumah	
5		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk/Tangki Septik}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALD dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun <25 Jiwa/Ha}} \times 100 \%$	$\frac{52.081}{59.361} \times 100\%$	87,74 %
6		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Lumpur Tinjanta telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun >25 Jiwa/Ha}} \times 100 \%$	$\frac{7.28}{59.361} \times 100\%$	12,26 %
7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	$\frac{7.28}{59.361} \times 100\%$	12,26 %
1		Rasio Kepatuhan IMB Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota		37 buah

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
2		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kota yang dipelihara/dirawat		37 buah
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota		1.123,434 km
2		Panjang jalan yang dibangun		0 m
3		Panjang jembatan yg dibangun		0 m
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		321.673,9 m
5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0 m
6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		16.105 m
7		Panjang jembatan yang direhabilitasi		0 m
8		Panjang jalan yang dipelihara		1.653 m
9		Panjang jembatan yang dipelihara		28 m
1	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kota		468 orang
2		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota		468 orang

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
3	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota yang aktif dengan data termutakhir		100%
4		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota		100%
5		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota		100%
6		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		100%
7		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota		100%
8		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota		100%
9		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		100%
10		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota		227 Perusahaan
11		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota		183 Perusahaan

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
12		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		227 Perusahaan

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kota (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{26,4 \text{ Ha}}{45,13 \text{ Ha}} \times 100\%$	58,49 %
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota (m)				
2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun (Ha), Ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), Dioperasikan dan Pelihara (Ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota}} \times 100\%$	$\frac{1.661 \text{ Ha}}{5.700 \text{ Ha}} \times 100\%$	29,14 %
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik				

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				
3	<p>Pemenuhan dokumen RISPAM Kota</p> <p>Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota</p> <p>Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota penyelenggaraan SPAM</p> <p>Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM</p> <p>Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain</p>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	$\frac{\text{Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kota}}{\text{Jumlah total Proyeksi Rumah Tangga di Seluruh Kota Tersebut}} \times 100\%$	$\frac{13.908 + 42.721}{59.361} \times 100\%$	95,40 %
4	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPAL D}}{\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPAL D}} \times 100\%$	$\frac{52.081+7.280}{59.361} \times 100\%$	100%

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		$\frac{\text{Jumlah Rumah di Kota}}{\text{Jumlah Rumah di Kota}}$	59.361
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar			
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman			
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman			
5	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang Sesuai Peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang Berlaku}} \times 100\%$	Data Menjadi Wewenang Dinas Perumahan dan Permukiman
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kota yang dipelihara/dirawat			
6	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Kota Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kewenangan Kota Mantap}} \times 100\%$	$\frac{(472,69 + 381,67)}{\text{Km}} \times 100\%$ 76,05 %

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang jalan yang dibangun		<i>Panjang Jalan Keseluruhan di wilayah Kota</i>	<i>(555,275 + 568,159) Km</i>	
	Panjang jembatan yg dibangun				
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)				
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan				
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi				
	Panjang jembatan yang direhabilitasi				
	Panjang jalan yang dipelihara				
	Panjang jembatan yang dipelihara				
7	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/Analisis di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{468 \text{ orang}}{908 \text{ orang}} \times 100\%$	51,54 %
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota				
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kota yang aktif dengan data termutakhir				

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota				
	<p>Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota</p> <p>Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota</p> <p>Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota</p> <p>Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota</p>	<p>Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</p>			

NO	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			
8		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangannya pengawasannya}} \times 100\%$	<p>Sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada paragraph 4 Pengawasan oleh Bupati/Walikota pasal 133 ayat (1) huruf c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; dan ayat (2) Pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perorangan. Berdasarkan hal tersebut di atas sampai saat ini tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh usaha orang perseorangan sehingga tidak ada data kecelakaan konstruksi</p>

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

----- Nihil -----

BAB V
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Pada Tahun 2019, mengalami perubahan regulasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabelberikut ini:

Tabel. 6
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional Tahun 2019
I.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2020 ada dua Indikator dari target Nasional, yaitu:

1

Jenis Pelayanan Dasar:

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator	Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2020	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2020	Target Nasional s/d Tahun 2020
I.	1. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	91,24	95,40 %	100,00%

Jenis Pelayanan Dasar:

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2020	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2020	Target Nasional s/d Tahun 2020
I.	1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,16 %	100,00 %	100,00%

B. ALOKASI ANGGARAN

Adapun rencana anggaran untuk tahun 2021 dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 11.821.331.980,-**. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7
Alokasi Rencana Anggaran
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Indikator		Program	Perhitungan Rencana Biaya Tahun 2020
I	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Penyediaan Air Minum	5.502.761.480,-
	2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Penyediaan Sistem Air Limbah	6.318.570.500,-

C. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Orang
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak	Orang
Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut	
Kepala Dinas (ess. II b)	Orang
Sekretaris (ess. III a)	Orang
Kepala Bidang (ess. III b)	Orang
Kasubag/Kasi (ess. IV a)	Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak	Orang

D. PERMASALAHAN SOLUSI

SPM Bidang Air Minum belum mencapai target karena dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru hanya 71.97% (47.268 KK) yang memperoleh akses air minum aman, atau dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang terlayani oleh jaringan pipa PDAM. Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan data BPS, 23,43% (15.389 KK) dari total jumlah KK yang tersebar di 5 kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah > atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah < atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2020 adalah sebesar 95,40%, yang artinya terdapat 4,6% jumlah KK se Kota Banjarbaru (3.023 KK) yang belum memiliki akses layak. Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total persentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 28,03% dari 5 kecamatan, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Cempaka sebesar 53,54%.

Target SPM Bidang Air Minum dengan akses aman 100% dan akses layak 0% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU) Pencapaian Target SPM* yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih kurang tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Cempaka, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan kegiatan sehari-hari adalah lebih kepada faktor ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya. Padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar, dalam hal ini pada musim kering, air cukup keruh dan berbau. Sebagaimana diketahui sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak terdapat di 4 kelurahan di kecamatan ini.

Oleh karenanya, agar akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman melalui sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan SPM Tahun 2020, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian dua Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 terdapat satu indikator yang belum mencapai target nasional dikarenakan oleh :

- Jalur PDAM dengan sistem pembayaran berlangganan kurang diminati oleh masyarakat daerah Cempaka, karena sebagian besar penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan kawasan tersebut sebagian besar kawasan padat penduduk tetapi bukan merupakan kompleks perumahan;
Usaha meminimalkan hal diatas kiranya perlu pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat lebih lanjut mengenai penyehatan lingkungan terutama mengenai air minum yang aman, serta penganggaran kembali pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan target akan tercapai secara maksimal.

Dengan disusunnya laporan tahunan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi SKPD selain itu laporan tahunan ini sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diharapkan menjadi salah satu SKPD andalan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. SARAN

Untuk pelaksanaan Kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2020, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang perlu SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaannya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.

Lampiran Foto Visual Pekerjaan Pada Tahun Anggaran 2021

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

Nama Pekerjaan :

Pembangunan Drainase Komplek Asabri RT. 18 RW. 04 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara

Nama Pelaksana :

CV. AKBAR BINTANG PERKASA

Nomor Kontrak :

621/03/SP/PDL-5/DPU&PR/2021

Tanggal Kontrak :

11 Mei 2021

Nomor SPMK:

621/05/SPMK/PDL-5/DPU&PR/2021

Tanggal SPMK :

19 Mei 2021

Waktu Pelaksanaan :

150 Hari Kalender

- **Pekerjaan Pasangan Batu**



- Pekerjaan Uditch 40x60 cm



- Pekerjaan Crossing



Kegiatan :
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)
Sub Kegiatan :

Nama Pekerjaan :
Pengembangan Jaringan Distribusi Air dan Sambungan Rumah Kel. Landasan Ulin Selatan
Kec. Liang Anggang

Nama Pelaksana :
CV. BATU PAYUNG MANDIRI

Nomor Kontrak :
690/03/SP/AM DAK-1/DPU&PR/2021

Tanggal Kontrak :

Nomor SPMK:

Tanggal SPMK :

Waktu Pelaksanaan :



Kegiatan :
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)
Sub Kegiatan :

Nama Pekerja :
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Nama Pelaksana :

CV. BRAMA JR

Nomor Kontrak :

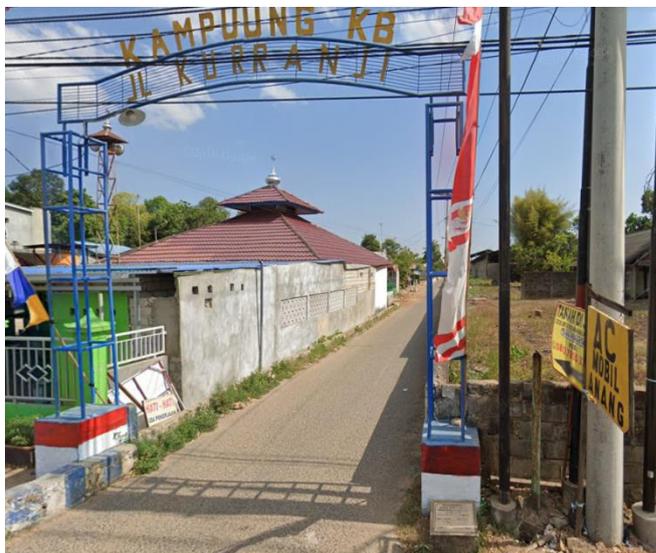
690/03/SP/AM DAK-2/DPU&PR/2021

Tanggal Kontrak :

Nomor SPMK:

Tanggal SPMK :

Waktu Pelaksanaan :



Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Nama Pekerjaan :

Pembangunan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Handil Kiai

Nama Pelaksana :

CV. AKMAL JAYA LESTARI

Nomor Kontrak :

690/03/SP/AM-SB/DPU&PR/2021

Tanggal Kontrak :

Nomor SPMK:

Tanggal SPMK :

Waktu Pelaksanaan :



Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Nama Pekerjaan :

Peningkatan Sungai Gt. Royong (Paket 1)

Nama Pelaksana :

PT. PRATAMA AMANAT SEJAHTERA

Nomor Kontrak :

610/01/SP/PTS-1/DPU&PR/IV/2021

Tanggal Kontrak :

Nomor SPMK:

Tanggal SPMK :

Waktu Pelaksanaan :



Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Nama Pekerjaan :

Peningkatan Sungai Sumba (Paket 2)

Nama Pelaksana :

CV. DWI KARYA PERKASA

Nomor Kontrak :

610/02/SP/PTS-2/DPU&PR/IV/2021

Tanggal Kontrak :

Nomor SPMK:

Tanggal SPMK :

Waktu Pelaksanaan :



